

**PERANAN DINAS SOSIAL KOTA MEDAN DALAM
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN**

SKRIPSI

DISUSUN

OLEH :

NURHAFIZAH DILLA

15.852.0032



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/24

PERANAN DINAS SOSIAL KOTA MEDAN DALAM
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)21/8/24

JUDUL SKRIPSI : PERANAN DINAS SOSIAL KOTA
MEDAN DALAM PEMBERDAYAAN
ANAK JALANAN

NAMA MAHASISWA : NURHAFIZAH DILA

NIM : 15.852.0032

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MENYETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



(Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP)



(Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd)

MENGETAHUI

DEKAN



(Dr. Hari Kusmanto, MA)

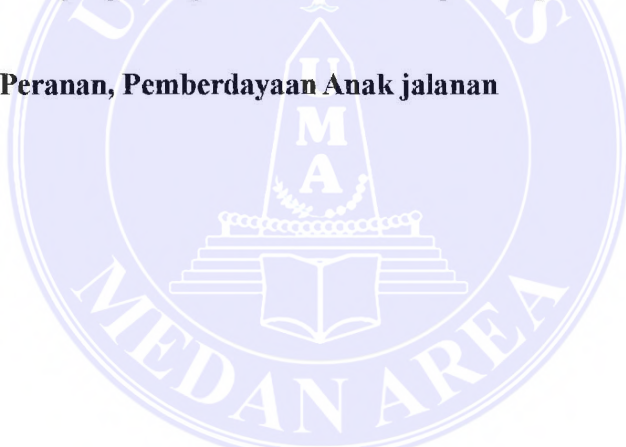
ABSTRAK

PERANAN DINAS SOSIAL KOTA MEDAN DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN

NURHAFIZAH DILA
15.852.0032

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdaan anak jalanan terutama dalam kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Peranan Dinas Sosial kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan, 2) Apa saja Hambatan Dinas Sosial kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian pada Kantor Dinas Sosial Kota Medan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Staff Koordinasi Unit Reaksi Cepat (URC) dinas sosial kota Medan, Sub Bagian Umum, dan anak jalanan. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas sosial di Kota Medan dalam Pemberdayaan Anak jalanan berjalan sesuai Prosedur yang disepakati dan mendapat respon Positif dari Masyarakat.

Kata kunci : Peranan, Pemberdayaan Anak jalanan



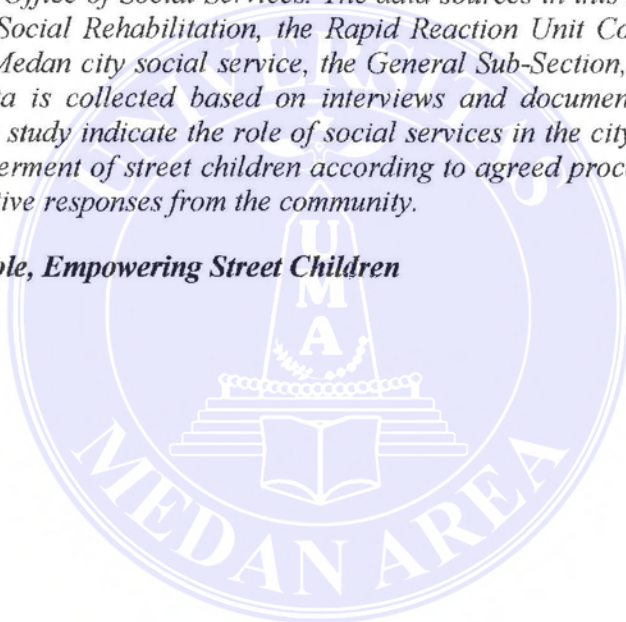
ABSTRACT

**ROLE OF SOCIAL SERVICES IN CITY OF MEDAN IN
EMPOWERMENT OF STREET CHILDREN**

NURHAFIZAH DILA
15.852.0032

This researcher intends to study the role of the Medan City Social Service in empowering street children as a priority, participation, self-reliance or independence, and maintenance. The problems raised in this study are: 1) What is the Role of the Medan City Social Service in empowering street children, 2) What are the Barriers to the Social Service of Medan in empowering street children. This study uses qualitative methods as a method of data analysis which takes the location of research at the Medan Office of Social Services. The data sources in this study were the Head of Social Rehabilitation, the Rapid Reaction Unit Coordination Staff (URC) Medan city social service, the General Sub-Section, and street children. Data is collected based on interviews and documentation. the results of this study indicate the role of social services in the city of Medan in the empowerment of street children according to agreed procedures and received positive responses from the community.

Keywords: Role, Empowering Street Children



RIWAYAT HIDUP

Nurhafizah Dilla, lahir di Lima Puluh tempatnya di Kwala Gunung pada tanggal 9 Juli 1997. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersudara, memiliki adik bernama Muhammad Prasetio Ramadila, Pasangan dari Bapak Suwardi dan Ibu Nila Wati. Penulis menyelesaikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di T.K Bakti Jl. Kertas No.19A, Sei Putih Bar, Medan Petisah, Kota Medan Di tahun 2001-2003, pada tahun selanjutnya peneliti melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di Dharma Wanita Jl. Melati II No.30, Sempakata, Medan Selayang, Kota Medan ditahun 2003-2009, kemudian pada tahun selanjutnya peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 10 Medan Jl. Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan ditahun 2009-2012, selanjutnya peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Namira Tech Nusantara Jl. Ps. 1 No.76, Tj. Sari, Medan Selayang, Kota Medan ditahun 2012-2015.

Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, yang ada di Sumatera Utara kota Medan tempatnya di Universitas Medan Area (UMA). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Penulis melaksanakan kuliah kerja lapangan di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Gatot Subroto No.KM. 5.5, Simpang Tj, Medan Sunggal, Kota Medan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Dinas Sosia Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banya mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Teristimewah kepada kedua Orangtua yang sangat saya cintai untuk Ayahanda Suwardi dan Ibunda Nila Wati, yang telah memberi dukungan serta doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis selama ini.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, M.A Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd selaku ketua program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP selaku pembimbing 1, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membimbing dan mengarahka penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Chairika, selaku sekertaris yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Staf tata usaha Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam mengurus berkas dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
9. Saudara-saudara tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Rudi Ripianto Parinduri S.H Selaku Sub Bagian Umum Dinas Sosial Kota Medan yang sudah memberi arahan untuk mempermudah penulis dalam pengambilan data.
11. Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing Selaku Staff Koordinasi URC Dmas Sosial kota Medan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
12. Seluruhnya terimakasih untuk teman-teman stambuk 2015 untuk Administrasi Publik, Pemerintahan serta Komunikasi di Universitas Medan Area.

Medan, 11 April 2019

Penulis



Nurhafizah Dilla
15.852.0032

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Perumusan masalah	3
1.3 Tujuan masalah	4
1.4 Manfaat penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi peranan	6
2.2 Konsep pemberdayaan	10
2.2.1 pengertian pemberdayaan	10
2.2.2 prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat	11
2.2.3 strategi pemberdayaan	14
2.2.4 tujuan pemberdayaan	16
2.2.5 pemberdayaan anak jalanan	17
2.3 konsep anak jalanan	19
2.3.1 pengertian anak jalanan	19
2.3.2 kategori anak jalanan	21
2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Anak Jalanan	21
2.3.4 Regulasi tentang anak jalanan	24
2.4 KerangkaBerpikir	26
2.5 Penelitian yang relevan	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis penelitian	30

3.2 Lokasi dan waktu penelitian.....	30
3.3 Informan penelitian.....	31
3.4 Teknik pengumpulan data.....	32
3.5 Teknik analisa data.....	34

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Sejarah dinas sosial kota Medan	37
4.2 Visi dan misi	39
4.3 Struktur organisasi	41
4.4 Tugas pokok dan fungsi dinas social kota Medan	41
4.5 Peranan dinas sosial kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan.....	44

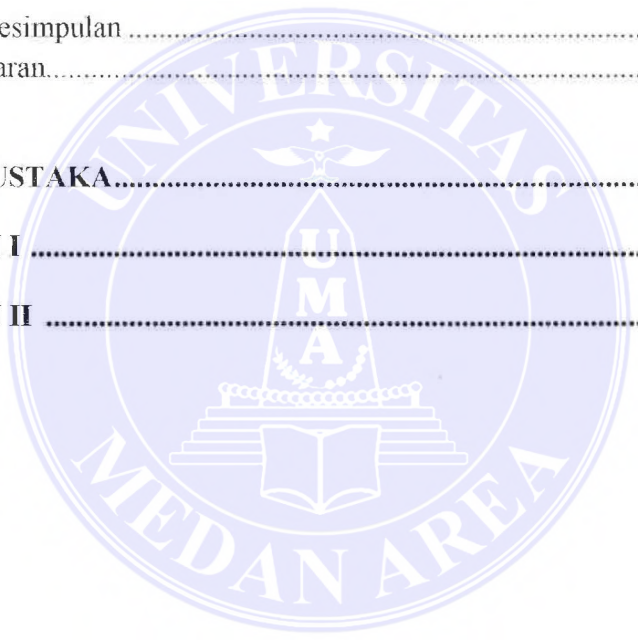
BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA.....	56
----------------------------	-----------

LAMPIRAN I	59
-------------------------	-----------

LAMPIRAN II	64
--------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia juga memiliki sejumlah permasalahan baik sosial maupun ekonomi yang terus menerus mengikuti pola pertumbuhan dan pembangunan. Bagi bangsa Indonesia, masyarakat keluarga kurang mampu, anak-anak dan krisis ekonomi merupakan awal dari timbulnya masalah yang sulit dipecahkan. Salah satu fenomena sosial yang terjadi saat ini yaitu munculnya anak-anak jalanan. Banyak dari keluarga tersebut menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan cara melibatkan anak-anaknya untuk mencari rejeki di pinggir jalan lampu merah. Hal tersebut yang menjadi semakin meluasnya anak jalanan di Indonesia termasuk kota Medan merupakan persoalan sosial yang kompleks.

Banyaknya anak jalanan yang muncul, menyebabkan permasalahan dan persaingan tersendiri antara anak jalanan dan preman. Menurut Kementerian Sosial RI setiap tahunnya pertambahan anak jalanan semakin meningkat dan ditambahnya pertumbuhan penduduk yang semakin padat. Menurut hasil data badan pusat statistik kota Medan yang terakhir di update pada tanggal 18 Januari 2017 jumlah penduduk kota Medan sebesar 2.210.624. (Medankota.bps.go.id).

Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar, anak jalanan yang usianya masih kecil sering mendapatkan perlakuan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/24

tidak semena-mena dari anak jalanan yang usianya lebih dewasa. Seperti dimarah-marahi dan diambil hasil ngamennya, bahkan anak jalanan juga mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari pereman, dirampas uang mereka, bahkan ada yang sampai di perlakukan seperti hal yang tak wajar seperti dipukul, diperkosa dan masih banyak lagi kasus-kasus yang di alami oleh anak jalanan. Anak jalanan telah menjadi fenomena fokus perhatian masyarakat. Adapun jumlah anak jalanan hasil penertiban kota Medan tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 693 orang. Ditahun 2016 sebanyak 184 orang, ditahun 2017 sebanyak 172 orang, dan ditahun 2018 sebanyak 337 orang.

Setiap anak merupakan potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, oleh karena itu perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Makanya perlu adanya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Selain itu, Direktorat Kesejahteran Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah, berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Anak jalanan yang dimaksud di sini adalah anak yang berusia di bawah 15 tahun dengan kepribadian yang lebih dewasa dari usianya, baik secara fisik maupun sifatnya menjadi anak dewasa walaupun usia mereka masih anak-anak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Beberapa anak jalanan di sekitar kota Medan menggantungkan hidupnya sebagai pengemis jalanan, ada juga yang berprofesi sebagai pengamen pada saat lampu merah lalu lintas, merapikan letak sepatu di mesjid, maupun pengemis yang selalu mengharapkan belas kasihan dari setiap orang yang ia temui baik di jalan raya, pasar, tempat hiburan, rumah makan dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan tentang anak jalanan. Namun seiring dengan kemajuan zaman dan perekonomian di Indonesia saat ini dengan naiknya harga kebutuhan barang-barang pokok, kasus anak jalanan juga semakin besar.

Peranan Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan anak jalanan. Sehingga dengan adanya Peranan Dinas Sosial dapat mengurangi anak jalanan. Oleh karena itu Dinas Sosial selaku Bidang Kesejahteraan Sosial memberikan motivasi atau pelayanan terhadap anak jalanan yang ada. Dinas Sosial suatu lembaga yang ada di kota Medan yang berperan untuk pemberdayaan anak jalanan.

Oleh karena itu melihat pentingnya masalah yang telah dijelaskan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dengan judul penelitian “Peranan Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Bagaimana peranan Dinas Sosial di kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan.?
2. Apa saja hambatan Dinas Sosial di kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan.?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penelitian yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan tentang peranan Dinas Sosial di kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Dinas Sosial di kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang Sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Kantor Dinas sosial, diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam pemberdayaan anak jalanan dan masalah sosial lainnya di kota Medan.

- b. Bagi Prodi Administrasi Publik Universitas Medan Area, sebagai bahan masukan untuk pembaca di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- c. Bagi Penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Peranan Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan, sehingga dapat menjadikan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Peranan

Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014:349).

Menurut Soerjono Soekanto (2004:243) bahwa peranan adalah pertama, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan. Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan perbuatan-perbuatan orang lain. ketiga, peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Adapaun peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :
 - a. Cara (*Usage*), lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.

- b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut
 - c. Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
 - d. Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2012 : 174).

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
3. Dalam masyarakat kadang juga di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut. (Soerjono Soekanto, 2002 : 247).

Jenis jenis peran menurut Soerjono Soekanto dibagi atas 3 macam yaitu :

1. Peran aktif, yang dimaksud dengan peran aktif adalah suatu peran seseorang yang aktif pada suatu organisasi yang diukur pada kontribusi yang diberikannya.
2. Peran partisipasif, jenis peran ini diartikan sebagai peran yang dilakukan seseorang yang disebabkan dari kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
3. Peran pasif, arti dari peran pasif adalah sebagai suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu yang di fungsikan sebagai simbol dalam kondisi tertentu didalam kehidupan masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2002 : 243).

Menurut Miftah Thoha (2012:10) Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka

macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

Menurut Veitzal Rivai (2004:148), peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2005:148), peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peranan atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinya.

Sedangkan pengertian peranan menurut Komaruddin (2007:768) adalah :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status.
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal dan aspek dinamis dari pada kedudukan sesuai dengan hak dan kewajibannya yang ditimbulkan karena jabatan tertentu dalam suatu organisasi.

Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan :

1. Ketentuan peranan, pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya.

2. Gambaran peranan, suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.
3. Harapan peranan. adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.

2.2 Konsep Pemberdayaan

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Abu Hurairah, 2008 :82)

Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya (Adi Fahrudin, 2012 : 16).

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Ginandjar Kartasmita, 1995 :18).

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan

keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik (Soewarman Hasan, 2002 : 56).

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya (Suhendra, 2006 : 74).

2.2.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

4 indikator Prinsip-Prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Najiatidkk, (2005:54) yang meliputi :

1. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing

saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

2. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip "*mulailah dari apa yang mereka punya*", menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang

telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Selain prinsip tersebut Edi Suharto (2005 : 68) juga berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai *partner*. Adapun prinsip tersebut adalah:

1. Proses pekerjaan sosial menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
2. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
3. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
4. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi kasus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.

5. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
6. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri. tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
7. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
8. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
9. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif dan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
10. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

2.2.3 Strategi Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaannya perlu di landasi dengan strategi demi keberhasilan untuk membentuk anak jalanan yang berpotensi dan bermasa depan. Pranarka dan Vidhyandika, menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. (Pranarka. A.M.W., dan Vidhyandika, 1996)

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau sekunder

menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Pemilihan cara/teknik ini tentu saja akan menentukan keberhasilan proses dan hasil dari kegiatan pemberdayaan tersebut. Adapun cara yang digunakan sebagai berikut:

1. Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk merefleksikan, respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pihak dan hak sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama klien.
2. Cara pendekatan dengan cara penyimpanan pesan melalui *socialization* dan *extension education* terutama pada anak jalanan tentang pentingnya merubah perilaku yang negatif dan positif yang di dasarkan atas kesadarannya sendiri, agar masyarakat dapat menerima mereka kembali di tengah-tengah masyarakat.
3. Cara penyampaian melalui diskusi yang terfokus pada kelompok, dengan terfokus pada kelompok, serta melibatkan ketua kelompok anak jalanan, anggota anak jalanan, agen perubahan dan pihak yang memiliki *interest* terhadap masalah anak jalanan. Dikomunikasikan tentang kondisi yang terkait dengan perilaku-perilaku yang ingin dirubah atau dengan kekurangan yang dimiliki anak.
4. Cara penyampaian dengan cara massa/umum yaitu memobilisir lingkungan disekitar anak jalanan, mulai dari keluarga, kelompok, dan lingkungan di sekitar anak jalanan.

Semua cara atau teknik di atas menunjukkan perlunya menempatkan sasaran pemberdayaan sebagai subjek memiliki keragaman karakter, potensi dan kebutuhan. Masalahnya adalah bagaimana agen pemberdayaan membangkitkan kesadaran dan memotivasi sasaran agar mampu menggali potensi diri dan lingkungannya untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melaksanakan perubahan perilaku untuk menuju ke arah kemandirian. Perubahan perilaku ini baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu petugas yang memberdayakan individu, masyarakat baik formal maupun non formal dapat disebutkan sebagai agen pemberdayaan (*agent empowerment*). (Soetomo, 2012)

2.2.4 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Edi Suharto, 2005 : 60).

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama pembangunan, ini terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk bukan beban suatu

bangsa, bila mutunya tinggi, untuk itu pembangunan hakekat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan dan perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan (Anwar, 2017 : 3).

2.2.5 Pemberdayaan Anak Jalanan

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, pertama yang menekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kedua, kecenderungan yang menekankan pada proses menyelimuti, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberdayaan bagi anak jalanan yakni tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan atau hak anak jalanan yang terampas karena berkeliaran di jalan, tetapi juga ingin menanamkan penguasaan hak dan memberi peluang agar potensi setiap anak dapat teridentifikasi kemudian dikembangkan. Tujuan tersebut antara lain untuk mengembalikan rasa percaya diri dan rasa aman, membuka wacana pada masalah yang dihadapi anak, kemampuan bertahan hidup, serta pembekalan diri untuk masa depan (Indrasari Tjandraningsih, 1996:3).

Pemberdayaan anak jalanan adalah suatu proses pemberian kemampuan yang berupaya agar anak jalanan dapat memotivasi, mendorong dirinya guna memperoleh daya dan memaksimalkan daya yang ia miliki untuk menentukan tindakan, termasuk mengurangi efek negatif atau hambatan yang ada di dalam dirinya dan lingkungannya. Dengan kegiatan peningkatan kualitas anak jalanan melalui pemberian pendidikan, pelatihan dan belajar usaha agar mereka menjadi

warga masyarakat yang produktif. Hal ini dapat diumpamakan dengan memberi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kail kepada anak jalanan dengan harapan ketika, ikan yang dikonsumsi anak jalanan habis, anak jalan ini akan kembali berusaha mengailnya sendiri karena mereka punya cara sendiri untuk hal itu. Dengan demikian, pemberdayaan anak jalanan ini menjadi sangat strategis karena dapat menyelamatkan anak jalanan dengan mencegah berbagai masalah lain, baik dalam menghindari eksploitasi dalam pekerjaan maupun masalah dalam penampilan perilaku.

Dalam konteks pemberdayaan itu peran pemerintah melalui kantor Dinas Sosial makin perlu digalakkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran yakni sikap mandiri, agar anak-anak jalanan dapat menampaki masa depan yang lebih cerah dan maju. Ada berbagai upaya dalam pemberdayaan anak jalanan. Upaya pemberdayaan anak jalanan dapat berbentuk melalui program-program (UNICEF, 1999 : 77) seperti:

1. *Street Based* Pendekatan dijalanan untuk menjangkau dan mendampingi anak jalanan agar mengenal, mempertahankan relasi dan komunikasi serta melakukan penanganan dijalan seperti konseling, diskusi, permainan *literacy* dan pemberian informasi. Orientasi *Street based* diarahkan pada upaya menangkal pengaruh- pengaruh negatif jalanan dan membekali anak jalanan dengan nilai-nilai dan wawasan positif.
2. *Centre based* Pendekatan yang memosisikan anak jalan sebagai penerima pelayanan di suatu center atau pusat kegiatan dan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Selama berada dicenter ia akan memperoleh pelayanan sampai mencapai tujuan yang dikehendaki. Seperti *Boarding house* atau panti.

3. *Family and Community based* Pendekatan yang melibatkan keluarga dan masyarakat yang bertujuan mencegah anak-anak turun kejalanan dan mendorong penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan anak. *Family* dan *Community based* mengarah pada upaya membangkitkan kesadaran, tanggungjawab, partisipasi anggota keluarga dan masyarakat dalam mengatasi masalah anak jalanan.

2.3 Konsep Anak Jalanan

2.3.1 Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara eufemistik sebagai anak mandiri. Usulan Rano Karno ia menjabat sebagai Duta Besar UNICEF, sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan terealisasi dari perlakuan kasih sayang, karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi, anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

Sebagai bagian dari pekerja anak (*child labour*), anak jalanan sendiri sebenarnya bukanlah kelompok yang homogen. Mereka cukup beragam, dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaannya, hubungannya dengan orang tua atau orang-orang dewasa yang terdekat, waktu dan jenis kegiatannya di jalanan, serta

jenis kelaminnya (Irwanto, 1997 : 200)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/24

Secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok (Tjandraningsih, 1996 : 68) :

1. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan diberikan kepada orang tuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.
2. *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.
3. *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ketempat yang lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-

rumah liar sepanjang rel kereta api, dan sebagainya, walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.

2.3.2 Kategori Anak Jalanan

Menurut Bagong Suyanto (2010 : 211) anak jalanan dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis yaitu :

1. Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi dijalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang kerumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal dijalanan namun masih bisa mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin.
2. Anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya dijalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya.
3. Anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya dijalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga dijalanan.
4. Anak berusia 5-17 tahun yang rentan bekerja dijalanan, anak yang rentan bekerja dijalanan, atau yang bekerja dan hidup dijalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Anak Jalanan

Menurut Bagong Suyanto (2010 : 212) faktor yang menyebabkan anak-

anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

21

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/24

1. Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putus,berpetualangan, bermain-main atau diajak teman.
2. Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga atau tetangga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi masalah fisik, psikologis dan sosial. Hal ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya masalah keluarga yang disebabkan oleh kemiskinan pengangguran, perceraian, kawin muda, maupun kekerasan dalam keluarga.
3. Melemahnya keluarga besar, dimana keluarga besar tidak mampu lagi membantu terhadap keluarga-keluarga inti, hal ini diakibatkan oleh pergeseran nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan pembangunan pemerintah.
4. Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak, dimana orang tua sudah tidak mampu lagi memahami kondisi serta harapan anak-anak, telah menyebabkan anak-anak mencari kebebasan.
5. Keluarga miskin hampir seluruh anak jalanan berasal dari keluarga miskin. Sebagian besar dari mereka berasal dari perkampungan-perkampungan urban yang tidak jarang menduduki lahan-lahan milik Negara dengan membangun rumah-rumah petak yang sempit yang sewaktu-waktu dapat digusur. Anak jalanan yang berasal dari luar kota, sebagian besar berasal dari desa-desa miskin.Kemiskinan merupakan faktor dominan yang mendorong anak-anak menjadi anak jalanan. Anak dari keluarga miskin,

karena kondisi kemiskinan kerap kali kurang terlindungi sehingga menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan.

6. Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor risiko yang mendorong anak-anak pergi ke jalanan. Perceraian atau perpisahan orang tua yang kemudian menikah lagi atau memiliki teman hidup baru tanpa ikatan pernikahan sering kali membuat anak menjadi frustrasi. Rasa frustrasi ini akan semakin bertambah ketika anak ditiptkan ke salah satu anggota keluarga orang tua mereka atau anak yang biasanya lebih memilih tinggal bersama ibunya merasa tidak mendapatkan perhatian, justru menghadapi perlakuan buruk ayah tiri atau pacar ibunya.
7. Kekerasan keluarga merupakan faktor risiko yang paling banyak dihadapi oleh anak-anak sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari rumah dan hidup di jalanan. Berbagai faktor risiko lainnya yang berkaitan dengan hubungan antara anak dengan keluarga, tidak lepas dari persoalan kekerasan. Seperti kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dipaksa menyerahkan sejumlah uang tertentu setiap harinya, akan menghadapi risiko menjadi korban kekerasan apabila tidak memenuhi target tersebut. Kekerasan dalam keluarga tidak hanya bersifat fisik saja, melainkan juga bersifat mental dan seksual.
8. Keterbatasan ruang dalam rumah bisa menimbulkan risiko anak-anak turun ke jalanan. Biasanya ini dialami oleh anak-anak yang berada di beberapa perkampungan urban yang menduduki lahan milik Negara. Banyak dijumpai adanya rumah-rumah petak yang didirikan secara tidak permanen dan sering kali menggunakan barang-barang bekas seadanya dengan ruang yang sangat

sempit, kadang hanya berukuran 3 x 4 meter saja. Dengan bentuk dan bangunan yang tidak layak disebut rumah itu, kenyataannya dihuni oleh banyak orang. Misalkan saja sebuah keluarga, termasuk hubungan suami istri berlangsung dalam ruangan yang terbatas itu, tentunya hal itu akan berpengaruh buruk terhadap anak-anak, biasanya yang berumur lebih dari 5 tahun memilih atau dibiarkan oleh orang tuanya untuk tidur di luar rumah, seperti di tempat ibadah (mushola atau masjid) yang ada di kampung tersebut, pos ronda, atau ruang-ruang publik yang berdekatan dengan kampung mereka.

2.3.4 Regulasi Tentang Anak Jalanan

Secara khusus peraturan perundang-undangan terhadap anak jalanan sampai saat ini belum ada, sehingga proses pengaturan terhadap ketertiban anak jalanan bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan juga karena berkaitan dengan ketertiban umum perihal anak jalanan sering dikaitkan sebagai gelandangan dan pengemis, maka dasar regulasinya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat tentang peranan pemerintah dalam melindungi setiap anak yang ada di Indonesia. Pada pasal 21 Undang-Undang tersebut menjelaskan kehadiran pemerintah dalam melindungi anak-anak Indonesia yaitu

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota layak Anak.

Dasar pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan oleh Dinas Sosial dapat dilihat pada pasal 22 UU No 35 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa :

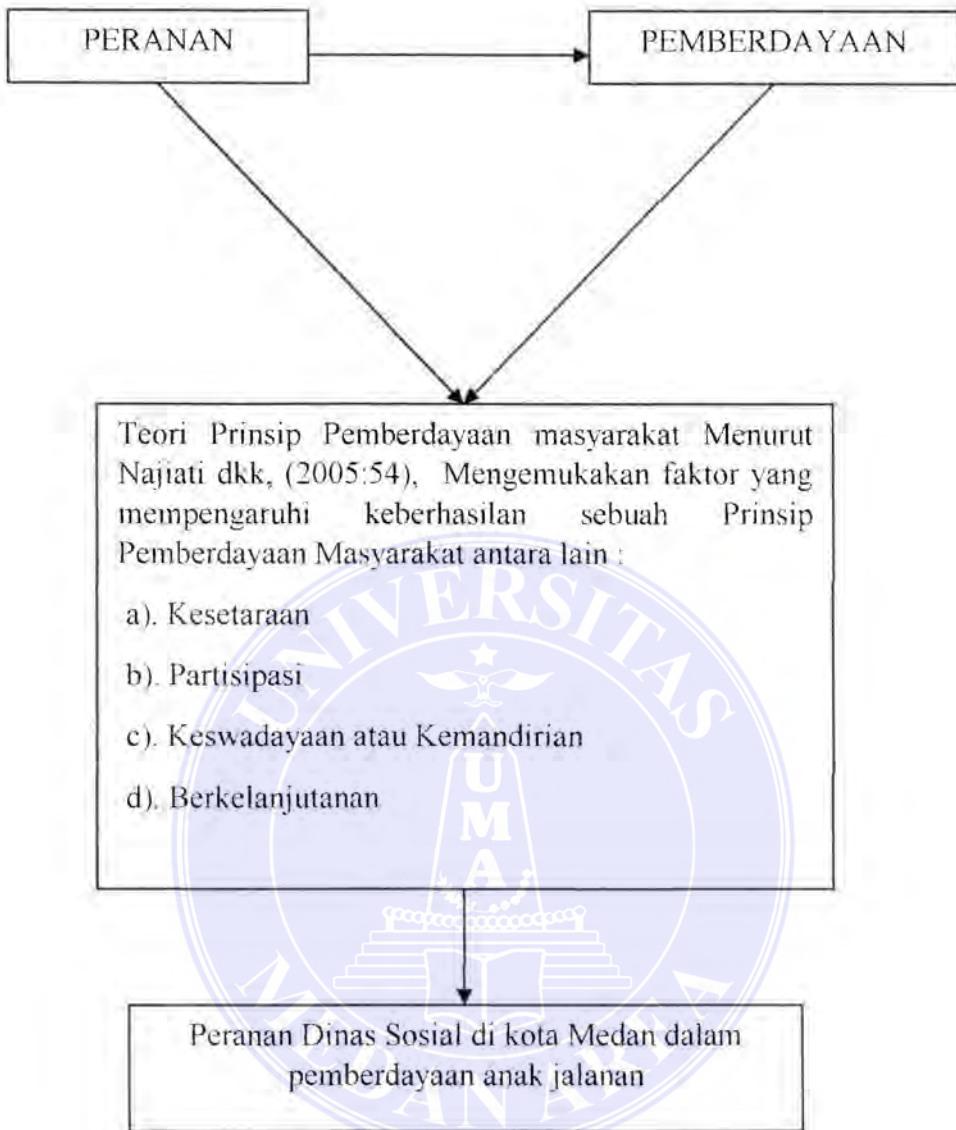
1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
2. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Sedangkan untuk kota Medan sendiri pemerintah kota Medan telah mempunyai regulasi yang mengatur bahwa anak dilarang dengan sengaja memeralat orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan, (Pasal 2 Ayat 2 Perda Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Peraktek Susila di kota Medan).

2.4 Kerangka Pikir

Menurut plano (2010 : 266) kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam ilmu pengetahuan empiris (ilmu politik dan ilmu pemerintahan), teori mengacu pada kaitan yang logis pada perangkat profesi yang memastikan adanya hubungan diantara variabel-variabel dengan maksud dengan menjelaskan kedua-duanya.

Dalam Penelitian ini, Penulis meneliti mengenai peranan Dinas Sosial di kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan, dalam menjawab rumusan penelitian ini penulis mengambil teori Prinsip Pemberdayaan masyarakat Menurut Najjati dkk, (2005:54), Mengemukakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah Prinsip Pemberdayaan Masyarakat antara lain: a.) Kesetaraan b). Partisipasi c). Keswadayaan atau Kemandirian d). Berkelanjutan:



(Gambar 2.1 kerangka fikir)

2.5 Penelitian yang relevan

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan (Rifky Masroni : 2016) dengan judul “Pemberdayaan Anak Jalanan, Studi Proses Dan Hasil Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Yogyakarta” diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemberdayaan untuk mengentaskan permasalahan anak jalanan meliputi proses persiapan, proses penjangkauan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

proses *assesment*, proses rapat koordinasi, proses pelaksana pemberdayaan, proses terminasi, dan proses evaluasi.

Proses persiapan dengan cara membuat tim ketugasan dan pemetaan wilayah jangkauan, proses penjangkauan yang dilakukan dengan cara menyapa anak jalanan di tempat-tempat mangkal. Pengidentifikasian lanjut dengan cara kerumah masing-masing anak jalanan yang melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat tempat tinggal anak jalanan, lalu mendiskusikan hasil yang telah diperoleh dari proses penjangkauan dan untuk merencanakan pelaksanaan pemberdayaan sehingga pemberdaaan sesuai dengan kebutuhan anak jalanan. Adapun proses pemberdayaan yang dilakukan melalui pelatihan, bantuan modal, dan pemberian kemudahan akses pendidikan, kesehatan. Jika anak jalanan telah mendapatkan pelatihan, anak telah mendapatakan bantuan modal. Proses evaluasi yang dilakukan dengan memantau kinerja yang telah dilaksanakan dimulai dari kendala-kendala yang di hadapi, sampai dengan hasil yang dicapai dalam pemberdayaan anak jalanan .

Kemudian hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh (*Fikriryandi Putra dkk : 2015*), penelitian yang berjudul “*Pemberdayaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah*” (*Share Social Work Jurnal*, Volume: 5, Nomor 1, ISSN:2339 - 0042) menghasilkan kesimpulan bahwa Anak jalanan merupakan anak yang terabaikandisebutkelompok Marjinal, rentan, dan dieksploitasi yang sebagian besar waktunya dipergunakan untuk mencari nafkah, berkeliaran di jalan, dan di tempat-tempat umum lainnya. Akan tetapi, keberadaan anak jalanan secara umum dibagi kedalam tiga kelompok kategori yaitu *Children of the street*, *children on the street* dan *children at high risk*. Dapat diketahui terjadinya anak jalanan bukan

hanya disebabkan dari faktor ekonomi saja, namun faktor keluarga dan lingkungan juga cukup berpengaruh terhadap munculnya anak jalanan. Dengan demikian berbagai faktor akan mempengaruhi keberadaan anak jalanan.

Departemen Sosial RI bekerja sama dengan UNDP (*United Nation United Programe*) dalam proyek INS/94/007 pembuatan Rumah Singgah (Departemen Sosial,1997:31). Dalam pendekatan ini penanganannya tidak dilakukan sendiri-sendiri. Namun, dilakukan secara terpadu dari tiga pendekatan yang pernah ada. Sehingga dalam pendekatan Rumah Singgah tercangkup pula pendekatan *street based* yaitu dengan melakukan penjangkauan dan pendampingan. Pendekatan *centre based* dimana Rumah Singgah merupakan tempat persinggahan bagi anak, selain itu Rumah Singgah juga melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagai rujukan dalam melaksanakan kegiatan *centre based* ini. Sedangkan pendekatan *community based* rumah singgah melakukan kerja sama atau menggali sumber yang ada di dalam masyarakat sehingga penanganan anak jalanan dapat sinkron dengan kehidupan dan kebutuhan di masyarakat.

Selain itu Rumah Singgah juga melakukan kegiatan berupa bimbingan dan pemberdayaan. Bimbingan dilakukan baik terhadap anak jalanan maupun terhadap orang tua anak jalanan. Bimbingan dilakukan baik dibutuhkan maupun tidak dibutuhkan oleh anak jalanan dan orang tua anak jalanan. Bimbingan ini dilaksanakan dengan cara mendatangi anak jalanan atau orang tua anak jalanan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta yang menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengankenyataan yang sebagaimana adanya dan mencoba menganalisis untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy, J, Moleong, 2007).

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jl. Pinang Baris / Jl. T. B. Simatupang (Belakang Terminal) No.114 B, Medan. Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui observai, wawancara dan dokumentasi. Waktu yang ditentukan untuk melakukan penelitian ini dimulai dari bulan desember 2018 sampai bulan Februari 2019 (selama 3 bulan).

a. Informan kunci (*key informant*)

Informan kunci yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Fahrul Rozi Pane S.Sos M.H(Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial)

b. Informan utama (*main informant*)

Informan utama yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Lamo Mayjend LBN Tobing (Selaku Staff Koordinasi URC Dinas Sosial Kota Medan), dan Bapak Rudi Ripianto Parinduri S.H (Selaku Sub Bagian Umum)

c. Informan tambahan (*additional informant*)

Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah Yogi Pratama, Aji Nogoro, Aisyah Adillah, Abbas Sigit Prawira, Gustav.

3.4 Teknik pengumpulan data

Menurut Sugiono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan untuk berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiono (2013: 145), observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

d. Triangulasi

Menurut Lexy J. Moleong (2012:330), Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

3.5 Teknik analisa data

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Analisi data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Milles dan Huberman (1984), mengemukakan aktivitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan, Penarikan/Verifikasi)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.
2. Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk Catatan Wawancara, Catatan Lapangan dan Catatan Dokumentasi. Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.
3. Kesimpulan, Penarikan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah

penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.



BAB V

KESIMPULAN

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini seperti yang tertulis di Bab I, yaitu untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Sosial di kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan dan mengetahui apa saja hambatan Dinas Sosial di kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan.

Dalam penelitian yang penulis lakukan berjudul “Peranan Dinas Sosial di kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan”, setelah diadakan wawancara, penyajian dan analisa data, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data sebelumnya, secara umum Peranan Dinas Sosial di kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan Berjalan dengan baik dan memiliki efektivitas yang bagus dilihat dari hasil yang menggunakan teori Prinsip Pemberdayaan masyarakat Menurut Najiati dkk, (2005:54) membagi Empat indikator tentang Prinsip Pemberdayaan dalam kaitanya dengan Masyarakat sebagai berikut:

1. Kesetaraan
2. Partisipasi
3. Keswadayaan atau Kemandirian
4. Berkelanjutan

Dimana Empat indikator tersebut telah direncanakan dengan baik, semuanya berjalan dan sesuai dengan yang disepakati bersama dan hambatan yang ada tidak begitu berpengaruh terhadap peran dinas sosial dalam pemberdayaan Anak jalanan, dengan kata lain peran dinas sosial di kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan berjalan sesuai prosedur yang disepakati dan mendapat respon positif dari masyarakat.

5.2 Saran

Guna lebih mengetahui peran dinas sosial di kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan dan apa saja hambatannya dapat dilakukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menindak tegas dan memberi sanksi Pegawai atau Staff yang menyalahgunakan wewenang agar kejadian yang tidak diinginkan Terjadi.
2. Peningkatan sosialisasi, monitoring serta control secara rutin untuk mengevaluasi dari hasil sebelum agar menjadi lebih baik kedepan.
3. Memiliki lebih dari satu *planning* agar dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Hurairah. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Adi, Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ahmad, Komarudin. 1997. *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Armai, Arif Dr. MA. 2002. *Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan*. Jakarta Surbakti,
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005. *Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta
- Bagong, Suyanto. Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka
- Dadang Supardan, 2009. *Pengantar Ilmu Sosial*, jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke delapan Belas Edisi IV. Jakarta: Gramedia
- Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005)
- Ginjar Kartasmita, 1997. *Pemberdayaan Masyarakat, Penanganan yang berakar pada masyarakat*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Lexy. J. Moleong, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Miftah, Thoha. (2012). *Perilaku organisasi konsep dasar dan implikasinya*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.

- Mintzberg, Siswanto dan Miftah Thoha (2012: 21-12). Pengantar *Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta. bumi aksara
- Moleong Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media: Jakarta.
- Pranarka. A.M.W., dan Vidhyandika, 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, diedit oleh: Onny S.P. dan Pranarka. Jakarta: *Center of Strategic and International Studies*.
- Prof. Dr. Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung.
- Ridho, Ali. 2005. *Peranan Pendidikan Agama Islam bagi Pertumbuhan Kesehatan Mental Agama Anak*. Pekalongan: Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan
- Soedijar Dkk. Maret 2009. *Prosiding Lokakarya Persiapan Survey Anak Rawan: Study Rintisan di Kotamadya Bandung*. Jakarta: Kerja Sama BPS dan UNICEF.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soetomo, 2012. *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Thoha , Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2005. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada